

HUBUNGAN KEBIJAKAN DAN KINERJA APARAT DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA BULO TIMORENG

¹⁾Anjas Asmara, ²⁾Monalisa Ibrahim, ³⁾Kamaruddin Sellang

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

43172089anjasasmara@gmail.com

monalisa2231@yahoo.com

kamaruddinsellang@yahoo.co.id

Abstrak

Riset ini bertujuan untuk mengetahui ikatan Kebijakan Serta Kinerja Aparat Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Bulu Timorang Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. Populasi riset ini beberapa 128 jiwa (keluarga penerima Dorongan Langsung Tunai) sedangkan jumlah sampel 56 jiwa (keluarga penerima manfaat bantuan BLT) orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, studi pustaka dan kuisioner. Teknik analisis data yang digunakan uji validitas, uji reliabilitas data, analisis tabulasi frekuensi, dan regresi linear berganda dan pengujian hipotesis serta analisis koefisiensi determinasi dengan bantuan aplikasi SPSS versi 16. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan kebijakan (X1) diperoleh nilai thitung lebih besar dari ttabel ($2,938 > 2,006$) maka H_0 ditolak H_1 diterima. Sehingga hipotesis yang berbunyi hubungan kebijakan terhadap kesejahteraan masyarakat secara persial diterima. Variabel Independen Kinerja Aparat Desa (X2) diperoleh nilai thitung lebih kecil dari ttabel ($0,821 < 2,006$) maka H_0 diterima dan H_2 ditolak. Sehingga hipotesis yang berbunyi kinerja aparat desa terhadap kesejahteraan masyarakat secara persial ditolak berarti tidak ada pengaruh X2 terhadap Y. Hasil uji F menunjukkan bahwa nilai Fhitung $> F$ tabel atau $6,403 > 3,17$. Dan tingkat signifikan $0,003 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_3 diterima berarti variabel independen (hubungan kebijakan (X1) dan kinerja aparat desa (X2) secara bersama-sama ataupun simultan mempengaruhi variabel dependen (kesejahteraan warga) secara positif serta signifikan. Hasil uji koefisien determinasi (R^2) membuktikan Adjusted R Square 0,164 ataupun 16,4% ialah berarti alterasi variabel kesejahteraan warga bisa dipaparkan oleh variabel ikatan kebijakan (X1) serta kinerja aparat desa (X2). Sisanya 83,6% bisa dipaparkan oleh variabel lain diluar riset penelitian.

Kata Kunci: kebijakan, kinerja aparat desa, dan kesejahteraan masyarakat

Abstract

This study aims to determine the relationship between policy and performance of village officials on the welfare of the community in Bulu Timorang Village, Panca Rijang District, Sidenreng Rappang Regency. The population of this study was 128 people (families of recipients of direct cash assistance) while the number of samples was 56 people (families of beneficiaries of BLT assistance). Data collection techniques used in this study were observation, interviews, literature study and questionnaires. The data analysis technique used was validity test, data reliability test, frequency tabulation analysis, and multiple linear regression and hypothesis testing and coefficient of determination analysis with the help of SPSS version 16 application. The results showed that the policy relationship. The results showed that the policy relationship (X1) obtained a tcount value greater than ttable ($2,938 > 2,006$) then H_0 is rejected and H_1 is accepted. So that the hypothesis which reads the relationship of policy to the welfare of society is partially accepted. The Independent Variable of Village Apparatus Performance (X2) obtained that the tcount value is smaller than ttable ($0.821 < 2.006$), so H_0 is accepted and H_2 is rejected. So that the hypothesis which reads that the performance of village officials on community welfare is partially rejected means that there is no effect of X2 on Y. The results of the F test show that the value of Fcount $> F$ tabel or $6.403 > 3.17$. And a significant level of $0.003 < 0.05$, then H_0 is rejected and H_3 is accepted, meaning that the independent variable (policy relationship (X1) and the performance of village officials (X2) simultaneously or simultaneously affects the dependent variable (community welfare) positively and significantly. the coefficient of determination (R^2) shows Adjusted R Square

0.164 or 16.4%, which means that the variation of the community welfare variable can be explained by the policy relationship variable (X1) and the performance of the village apparatus (X2), the remaining 83.6% can be explained by other variables outside the study. .

Keywords: policy, village apparatus performance, and community welfare

A. PENDAHULUAN

Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945, tentang amanat konsitusi kalau upaya penenggulangan, kemiskinan merupakan proteksi segenap bangsa Indonesia serta segala tumpah darah Indonesia, kenaikan kesejahteraan universal, pembelajaran kehidupan nasional, serta partisipasi dalam mewujudkan kedisiplinan dunia yang bersumber pada kemerdekaan, perdamaian abadi serta keadilan sosial. Kesejahteraan merupakan aspek penting dalam pembangunan suatu negara. Hal ini sesuai dengan cita-cita pembangunan Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Sebagai bagian dari cita-cita pembangunan, kesejahteraan rakyat harus menjadi tujuan utama dari semua kebijakan pembangunan yang ditempuh oleh pemerintah. Indonesia. Sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, pemerintah harus mengutamakan kesejahteraan rakyatnya untuk mencapai kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Maslow dalam Handa dkk (2014) konsep kesehteraan segala sesuatu yang Hal ini berkaitan dengan tingkat kebutuhan, dimana mutu hidup warga miskin erat kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan dasar. Oleh sebab itu, bila aspek manusia secara natural terpaut dengan aktualisasi diri, kebijakan publik bisa pengaruhi kesejahteraan subjektif dengan mengganti area eksternal (Khomaini 2020). Brudeseth (2015) menggambarkan kesejahteraan selaku tipe kepuasan hidup, yang bertujuan buat mengukur kondisi anggota warga dalam membangun penyeimbang hidup, tercantum, kesejahteraan modul, kesejahteraan bermasyarakat, kesejahteraan emosi, keamanan. (Han and goleman, daniel; boyatzis, Richard; Mckee 2019)

Todaro (2012) menunjukan bahwa indikator kesejahteraan disuatu Luas wilayah diukur dengan angka kemiskinan dan angka buta huruf, tingkat pendapatan Menghancurkan alam dan lingkungan, tingkat PDB. Kesejahteraan suatu daerah tergantung pada ketersediaan sumber daya manusia, material dan sumber daya lainnya. Sumb Ini berinteraksi dalam proses pembangunan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. er daya.(Han and goleman, daniel; boyatzis, Richard; Mckee 2019).

Sekian banyak definisi sebelumnya bisa dimengerti jika kesejahteraan merupakan peningkatan taraf hidup warga guna penuhi kebutuhan dasar serta menjadikan hidup lebih baik dari tadinya. Kesejahteraan warga dapat diukur dengan berbagai indikator- indikator Kebahagiaan ialah dimensi pencapaian sosial, bisa dikatakan apakah masyarakatnya sejahtera. Berikut sebagian penanda kesejahteraan warga: a. Pemasukan, b. Pengeluaran, c. tempat tinggal, d. kesehatan anggota keluarga, e. kemudahan memperoleh pelayanan kesehatan f. kemudahan memasukkan anak ke jenjang pembelajaran, gram. kemudahan memperoleh transportasi.

Kesejahteraan masyarakat dalam penelitian ini adalah pemberian bantuan langsung tunai, BLT merupakan implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2008 tentang pelaksanaan program bantuan langsung tunai (BLT) untuk rumah tangga sasaran (RTS) dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM. Rencana BLT dirancang untuk menggantikan kenaikan biaya hidup pada saat harga BBM naik, sehingga besarnya BLT diperhitungkan sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari kenaikan harga BBM akibat kenaikan harga (inflasi).(Akib and Risfaisal 2017).

Kriteria calon penerima yang dapat mendapatkan ialah keluarga kurang mampu memenuhi kebutuhan setiap harinya yang tinggal di desa itu yang. Selain itu, seluruh calon penerima bantuan bukan penerima Bantuan Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako maupun kartu prakerja. Pendataan calon penerima BLT di desa akan menggunakan Data Komprehensif Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.(Khomaini 2020). Ketentuan dan mekanisme pendataan hingga pelaksanaan pemberian BLT DD tercantum dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 yang diterbitkan 14 April 2020 tentang pergantian atas peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas konsumsi dana desa tahun 2020. Peraturan tersebut mengubah Peraturan Menteri Desa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Konsumsi Dana Desa Tahun Anggaran 2020. Pasal 8A dalam syarat itu menetapkan sebagian syarat penerima dorongan, semacam keluarga yang kehilangan mata pencarian maupun

pekerjaan, belum terdata menerima berbagai dorongan sosial, serta mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun maupun kronis. (Maun 2020).

Perekonomi dan kesejahteraan masyarakat maka pemerintah pusat mengeluarkan kucuran dana, dimana dana ini di sebut dana bantuan langsung tunai yang diperuntukan masyarakat miskin sesuai data yang ada didesa maka kinerja aparat desa sangat diperlukan terkait pengelolaan BLT di peruntukan untuk kesejahteraan masyarakat terkhusus desanya sesuai dengan syarat peraturan desa tentang penerima bantuan. Selain peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program bantuan, peningkatan kesejahteraan masyarakat juga dapat melalui pontesi desa. Potensi desa bulo timoreng memiliki potensi yang cukup baik. Terutama dari sektor sumber daya alam seperti lahan pertanian terutama lahan persawahan dan lahan perkebunan ini dapat dilihat dari mayoritas masyarakat bulo timoreng berprofesi sebagai petani sebanyak 37,78 %. Wilayah desa bulo timoreng juga cukup potensial untuk mengembangkan budidaya perikanan dan peternakan unggas, hal dapat dilihat dari banyaknya masyarakat desa bulo timoreng yang memiliki usaha peternakan unggas dan kelom ikan yang dikelola oleh masyarakat setempat.

Analisis hubungan kebijakan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat didesa bulo timoreng, peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian BLT serta dampak yang ditimbulkan dari segi ekonomi dan sosial apakah berperan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa bulo timoreng, sehingga untuk selanjutnya bisa dijadikan bahan pembelajaran dan perbandingan untuk pemberian BLT unuk kedepannya dan sebagai tolak ukur bagi aparat desa dalam mengelolah kebijakan yang ada didesa bulo supaya kebijakan yang di keluarkan pemerintah desa dapa berguna bagi masyarakat.

Program-program yang dilaksanakan dalam upaya pengentasan kemiskinan belum dapat membagikan akibat besar, sehingga tujuan dari pembangunan nasional terpaut kasus pemerataan kesejahteraan warga masih jadi kasus berkepanjangan. Oleh sebab itu pemerintah membentuk program yang disebut Program Bantuan Bantuang Langsung Tunai (BLT) guna pemerataan

kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan penerapan Program Bantuan Pangan Non Tunai yang ada di Desa Bulo Timorang Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang ini didasarkan pada tingginya jumlah rumah tangga miskin. Guna menunjang penerapan program Bantuan Bantuan Langsung Tunai, sehingga Presiden Republik Indonesia menetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Program ini diharapkan sanggup mengurangi beban pengeluaran masyarakat yang tergolong sebagai keluarga penerima manfaat melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program Dorongan Pangan Non Tunai yang diselenggarakan oleh pemerintah dalam rangka buat tingkatkan daya guna serta efisiensi, ketepatan target penerima dorongan dan mendesak keuangan inklusif.

Desa Bulo Timorang merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, juga menerapkan Program Bantuan Bantuang Langsung Tunai untuk membantu masyarakat. Adapun jumlah Kepala Keluarga (KK) penerima Bantuan Langsung Tunai di Desa Bulo Timorang Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami kenaikan dari tahun 2020 ke tahun 2021.

Keberhasilan program lebih efektif harus dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku terkait pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) khususnya di Desa Bulo Timorang Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang ada beberapa identifikasi permasalahan antara lain:

1. Data yang digunakan untuk penerima Program Bantuan Langsung Tunai masih menggunakan data lama sehingga banyak yang tidak tepat sasaran.
2. Kurangnya pembinaan dan pemberdayaan keluarga yang dilakukan oleh Pelaksana Program Bantuan Pangan Tunai.
3. Ketepatan waktu penyaluran bantuan yang tidak sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

Berdasarkan fenomena diatas bahwa cara untuk menggapai keberhasilan suatu program dengan menentukan kinerja aparat desa. berdasarkan teori yang diungkapkan oleh Agus Dwiyanto (2013: 50-51) dalam

bukunya Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia, menyebutkan Indikator Kinerja menurut adalah sebagai berikut:

1. Produktivitas. Ketika kita berbicara tentang produk produktivitas, masalah paradoks muncul karena tidak ada kesepakatan umum tentang arti produktivitas dan kriteria untuk mengukur indikator produktivitasnya dan tidak ada desain, metode, aplikasi atau metode aplikasi tidak dikritik. (Nur'aini 2012).
2. Kualitas Layanan. Pelayanan merupakan terjemahan dari istilah bahasa Inggris *service*, yang menurut Tjiptono (2011:20) mengacu pada tiap aksi ataupun perbuatan yang bisa disediakan oleh satu pihak kepada pihak lain, yang pada hakikatnya tidak berwujud serta tidak menuju pada kepemilikan suatu.
3. Responsivitas. Responsivitas dikira selaku salah satu penanda kinerja sebab energi paham secara langsung menggambarkan keahlian organisasi publik buat penuhi misi serta tujuannya, paling utama buat penuhi kebutuhan warga (Tangkilisan, 2005:177).
4. Responsibilitas. Tanggung jawab untuk menjelaskan apakah pelaksanaan bisnis badan publik dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang sehat atau sesuai dengan kebijakan badan tersebut, baik secara tersurat maupun tersirat. Oleh karena itu, pada titik tertentu, akuntabilitas dapat bertentangan dengan responsivitas. Aspek tanggung jawab adalah daya tanggap, produktivitas, ketepatan waktu dan disiplin kerja. (Herdiani 2015).
5. Akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan kewajiban buat mempertanggung jawabkan keberhasilan ataupun kegagalan misi organisasi dalam menggapai hasil yang sudah ditetapkan, lewat pertanggungjawaban sumber energi keuangannya (Herdiani 2015).

Sutrisno (2007: 125) suatu program dapat diukur melalui 6 indikator, antara lain Ketepatan sasaran, Pemahaman program, Ketepatan waktu, Tercapainya tujuan serta, Perubahan nyata. (Darmawan & Adiwidjaja, 2019). Maka bersumber pada uraian latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Hubungan Kebijakan Dan Kinerja Aparat Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Bulu Timorang Kecamatan Panca

Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang". Kebijakan dapat diartikan sebagai serangkaian rencana, kegiatan, tindakan, keputusan, sikap, tindakan atau bagian (pelaku-pelaku) non-tindakan sebagai tahapan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Perumusan kebijakan merupakan faktor penting bagi suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. (Iskandar, 2012).

Sejauh mana kinerja aparatur desa Bulu Timoreng hal ini muncul dari indikator kinerja yang digunakan sebagai ukuran keberhasilan operasi, dari beberapa indikator yang penulis sebutkan berfokus pada indikator yang dikemukakan oleh Agus Dwiyanto mengemukakan bahwa ada beberapa indikator yang bisa digunakan mengukur kinerja birokrasi publik yaitu Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas, Responsibilitas, Dan Akuntabilitas. (Priambodo, Purbalingga, and Kunci 2019). Kesejahteraan adalah suatu keadaan dimana seseorang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, baik itu pangan, sandang, papan, air bersih serta kemungkinan pendidikan lebih lanjut dan pekerjaan yang layak. dapat mendukung kualitas hidupnya. bahwa hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan atau kecemasan sehingga hidupnya akan aman, tenteram, baik lahir maupun batin. (Fahrudin, 2012).

Penanda kesejahteraan bagi Soetomo (2014:48) memiliki 3 komponen ialah:

1. Keadilan sosial memiliki beberapa penanda ialah: pembelajaran, kesehatan, akses pada listrik serta air, penduduk miskin
2. Keadilan ekonomi memiliki beberapa penanda ialah: pemasukan, kepemilikan rumah, tingkatan pengeluaran.

Keadilan demokrasi memiliki beberapa penanda ialah: rasa nyaman serta akses data.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif dimana penelitian ini bersifat deskriptif. Adapun populasi yang dijadikan penulis agar mendapatkan data dan informasi secara maksimal yaitu dengan menjadikan seluruh kepala rumah tangga yang menerima Bantuan Langsung Tunai dengan jumlah sebanyak 128 kepala keluarga, metode pengambilan ilustrasi memakai non

probability sampling, serta metode penarikan ilustrasi memakai rumus slovin dengan tingkatan kesalahan 10%, jadi jumlah ilustrasi dalam perihal ini sebanyak 56 KK. Metode pengumpulan informasi lewat observasi, wawancara, riset kepustakaan, serta kuesioner, sebaliknya metode analisis informasi memakai analisis tabulasi frekuensi uji mutu informasi, serta regresi linear berganda serta pengujian hipotesis.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat adaptabilitas kebijakan di tengah kelompok sasaran juga diharapkan berperan penting dalam keberhasilan realisasi kebijakan yang efektif. Dalam beberapa kasus, kelompok sasaran bersedia menerima realisasi program, dan dalam pelaksanaan kebijakan, dalam kasus lain, program sama sekali enggan untuk dilaksanakan. Indikator kebijakan yang pertama yaitu keadaptasian. Dalam suatu kebijakan yang berkaitan dengan tingkat keadaptasian ialah 71%. Hasil yang dilihat dari presentase maka dapat dikategorikan "Baik".

Keberhasilan implementasi suatu kebijakan diukur dari efektifitas waktu implementasinya. Pelaksanaan beberapa kebijakan melebihi batas waktu tujuan yang harus diselesaikan sebelum tiba pada waktu yang ditentukan. Indikator kebijakan yang kedua yaitu efisiensi. Kebijakan yang dilakukan aparat desa apakah sudah tepat waktu dalam menyalurkan bantuan pada masyarakat 70%. Hasil yang dilihat dari presentase maka dapat dikategorikan "Baik".

Mengukur tingkat keberhasilan implementasi kebijakan adalah mengukur sejauh mana program yang dilaksanakan dapat menghasilkan hasil yang berbeda. Bukan itu. Indikator kebijakan yang ketiga yaitu produksi. Dalam hal yang berkaitan dengan program-program yang di realisasikan oleh aparat desa ialah 70,6%. Hasil yang dilihat dari presentase maka dapat dikategorikan "Baik".

Mengukur sejauh mana suatu kebijakan dapat memuaskan kelompok sasaran dari rencana tersebut. Kelompok sasaran program kebijakan dapat menikmati manfaat dari program yang dilaksanakan oleh pelaksana program kebijakan. Indikator kebijakan yang keempat yaitu kepuasan. Dalam hal yang berkaitan dengan fasilitas

yang tersedia 66.4%. Hasil yang dilihat dari presentase maka dapat dikategorikan "Baik".

Kemampuan aparat dalam memiliki skill dalam melaksanakan tanggung jawab pekerjaannya. Sikap aparat desa tercermin dari semangat dan efisiensi kader desa dalam menjalankan fungsi kerjanya dan kesediaannya untuk mengabdikan kepada masyarakat. Indikator kinerja aparat desa yang pertama ialah produktivitas. Kinerja aparat dalam melakukan tugas dan tanggung jawab ialah 70,6%. Hasil dilihat dari presentase maka dapat dikategorikan "Baik".

Pertanggung jawaban aparat dalam menyelesaikan tugas dengan tepat waktu dalam pemberian pelayanan, tingkat kesalahan, kerusakan, dan kecermatan dalam melaksanakan tugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Indikator kinerja aparat desa yang kedua ialah kualitas layanan. Kinerja aparat dalam pemberian pelayanan sesuai prosedur yang telah ditetapkan kepada masyarakat 73,8%. Dan pemberian pelayanan kepada masyarakat apakah sudah dengan waktu yang telah disepakati 72%. Hasil dilihat dari presentase maka dapat dikategorikan "Baik".

Kemampuan aparat desa dalam menggali kebutuhan masyarakat, merumuskan agenda dan prioritas pelayanan, serta menyusun rencana pelayanan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Indikator kinerja aparat desa yang ketiga ialah Responsivitas. Kinerja aparat desa dalam membantu segala kesulitan yang terjadi pada masyarakat 70,2%. Hasil dilihat dari presentase maka dapat dikategorikan "Baik".

Kemampuan aparat desa dalam melaksanakan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang sehat atau sesuai dengan kebijakan organisasi. Indikator kinerja aparat desa yang keempat ialah Responsibilitas. Keterbukaan aparat desa memberikan pelayanan kepada masyarakat 75%. Dan aparat desa bertanggung jawab sepenuhnya dalam membantu melayani kebutuhan masyarakat 73,2%. Hasil dilihat dari presentase maka dapat dikategorikan "Baik".

Kemampuan aparat dalam mengacu pada sejauh mana kebijakan dan kegiatan lembaga publik bergantung pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat. di desa bulo timoreng Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. Indikator

kinerja aparat desa yang kelima ialah Akuntabilitas. Dalam hal ini aparat desa dapat mempertimbangkan aspirasi masyarakat dalam menyusun suatu kebijakan desa 69,6%. Hasil dilihat dari presentase maka dapat dikategorikan “ Baik”.

Keadilan sosial adalah keadilan yang sama untuk semua. Indikator keadilan meliputi: pendidikan, akses kesehatan dan akses dukungan. Indikator kesejahteraan masyarakat yang pertama ialah keadilan sosial. Masyarakat menerima keadilan sosial tentang bantuan langsung tunai 60%, kinerja aparat desa dalam pengelolaan bantuan langsung tunai untuk kesejahteraan masyarakat 69,6%, bantuan langsung tunai sudah mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari 62,4%. Dan bantuan langsung tunai dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat 60,6%.

Keadilan ekonomi adalah situasi atau situasi di mana orang mendapatkan hak mereka. Unsur-unsur indeks pemerataan ekonomi adalah: pendapatan, kepemilikan rumah, pengeluaran rumah tangga untuk kesehatan dan pengeluaran untuk pendidikan. Indikator kesejahteraan masyarakat yang kedua ialah keadilan ekonomi. Bantuan langsung tunai dapat mensejahterakan keadaan ekonomi masyarakat setempat 60%, Bantuan langsung tunai didasarkan atas dasar status kepemilikan rumah tempat tinggal 65,6. Dan bantuan langsung tunai dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat 60,2%.

Keadilan demokrasi, Demokrasi sangat penting dalam hal pembagian kekuasaan dalam suatu negara, dan kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat juga harus digunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Indikator keadilan sosial mencakup keamanan dan akses informasi. Indikator kesejahteraan masyarakat yang ketiga yaitu keadilan demokrasi. Bantuan langsung tunai diberikan secara adil pada masyarakat 67,4%. Hasil dilihat dari presentase maka dapat dikategorikan “ Baik”.

Berdasarkan hasil pengujian pada pengujian hipotesis dapat dijelaskan bahwa pada nilai F_{hitung} . Dan tingkat signifikan $0,003 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_3 diterima, dapat disimpulkan bahwa variabel “ Hubungan Kebijakan Dan Kinerja Aparat Desa Secara Bersamaan Berpengaruh Singnifikan Terhadap Kesejahteraan

Masyarakat Di Desa Bulu Timorang Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. Memiliki pengaruh sebesar 16,4% seperti yang ditunjukkan oleh tabel model summary dimana nilai R_{square} 0,164% atau 16,4% apabila hubungan kebijakan dan kinerja aparat desa dinilai kurang baik maka kesejahteraan masyarakat juga kurang baik.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan data yang diperoleh setelah diolah kembali, hasil penelitian tentang hubungan antara kebijakan dan kinerja kepala desa terhadap kesejahteraan penduduk desa Bulu Timorang, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: kesimpulan sebagai berikut.

1. Hubungan Kebijakan (X_1) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di desa bulu timorang. Hal ini dapat dilihat dari signifikan hubungan kebijakan (X_1) $0,005 < 0,05$. Dimana nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($2,938 > 2,006$) maka H_0 ditolak H_1 diterima. Sehingga hipotesis yang berbunyi hubungan kebijakan terhadap kesejahteraan masyarakat secara persial diterima. Sehingga variabel hubungan kebijakan mempunyai peran penting terhadap kesejahteraan masyarakat di desa bulu timorang kecamatan panca rijang kabupaten sidenreng rapaang.
2. Variabel Kinerja Aparat Desa (X_2) tidak berpengaruh secara positif dan tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di desa bulu timorang kecamatan panca rijang kabupaten sidenreng rapaang, dimana t_{hitung} untuk X_2 sebesar 0,821 lebih kecil dari t_{tabel} 2,006 dengan signifikansi sebesar 0,415 lebih besar dari taraf signifikansi yaitu 0,05. Berarti nilai t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($0,821 < 2,006$) maka H_0 diterima dan H_2 ditolak. Sehingga hipotesis yang berbunyi kinerja aparat desa terhadap kesejahteraan masyarakat secara persial ditolak berarti tidak ada pengaruh X_2 terhadap Y .
3. Pengujian secara bersama-sama, dimana pada nilai F_{hitung} sebesar 6.403 dengan nilai F_{tabel} adalah 3,17 sehingga nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $6.403 > 3,17$. Dan tingkat signifikan $0,003 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_3 diterima, dapat disimpulkan bahwa variabel hubungan kebijakan (X_1)

dan kinerja aparat desa (X2) secara bersama-sama atau simultan terhadap kesejahteraan masyarakat desa bulo timorang. Sehingga H3 menyatakan hubungan kebijakan dan kinerja aparat desa secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di desa bulo timorang kecamatan panca rijang kabupaten sidenreng rappang.

Zaidan, N. (2015). *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Zainuddin. (2017). *Teori-Teori Mutakhir Dalam Perspektif Ilmu Administrasi Publik*. Makassar: Phinatama Media.

E. REFERENSI

Hardiyansyah. (2018). *Kualitas Pelayanan Publik, Konsep, Dimensi, Indikator Dan Implementasinya*. Yogyakarta: Gava Media.

Hessel, N. S. (2015). *Manajemen Publik*. Jakarta: Grasindo.

Ibrahim. (2018). *Teori Dan Konsep Pelayanan Publik Serta Implementasinya*. Bandung: Refika Aditama.

Jamaluddin, A. (2015). *Metode Penelitian Administrasi Publik (Teori Dan Aplikasinya)*. Yogyakarta: Gava Media.

Monalisa, I. a. (2020). *Pembangunan Partisipatif Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Pasuruan Jawa Timur: Penerbit Qiara Media.

Mustanir, A. P. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Di Kelurahan Kanyuara Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang. *Politik Profesi*, 247-61.

Sahar, W. M. (2021). Implementasi Kebijakan tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Lagading Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Ilmiah Administrasi (JIA)*, 33-37.

Santosa, P. (2018). *Administrasi Publik, Teori Dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: Refika Adiatama.

Sinambela, L. P. (2017). *Reformasi Pelayanan Publik Teori Kebijakan, Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara.